

## POLA PEMBIAYAAN JASA PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI EKS KARESIDENAN BANYUMAS

Akhmad Darmawan, Hengky Widhiandono,  
Hermin Endratno, Azmi Fitriati

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pola pembiayaan TKI; dan (2) menganalisis kelayakan pembiayaan TKI. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat alternatif pola pembiayaan TKI, yaitu bersumber dari: (1) modal sendiri; (2) Perusahaan Jasa Pemberangkatan TKI; dan (3) perbankan. Dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan dan perkreditan dan aspek sosial ekonomi pola pembiayaan TKI layak untuk dilakukan. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, PJTKI telah memiliki segmen pasar yang jelas. Minat masyarakat untuk menjadi TKI juga masih tinggi. Berdasarkan aspek manajemen dan SDM, PJTKI pada umumnya mempunyai reputasi yang baik dengan karyawan yang berpengalaman. Berdasarkan analisis finansial, (a) payback period selama 3,15 bulan untuk sektor formal dan 6,28 bulan untuk sektor informal lebih cepat dibandingkan dengan lama kontrak kerja TKI yaitu 2 tahun; (b) IRR sebesar 20,71% untuk sektor formal dan 20% untuk sektor informal lebih besar dari tingkat bunga kredit TKI; (c) NPV sebesar 31.260.000 untuk sektor formal dan 18.745.000 untuk sektor informal semuanya positif; (d) PI sebesar 3,81 untuk sektor formal dan 1,9 untuk sektor informal. Sedangkan berdasarkan aspek perkreditan dengan menggunakan analisis kredit 5 C pembiayaan terhadap TKI layak untuk dilakukan. Berdasarkan aspek ekonomi, pembiayaan TKI berdampak pada pembangunan ekonomi nasional, mampu mendatangkan devisa, mengurangi pengangguran dan memberi perubahan status sosial ekonomi TKI menjadi lebih baik. Dengan catatan apabila dikelola dengan benar.

Kata kunci: pola pembiayaan TKI, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan dan perkreditan dan aspek sosial ekonomi

### PENDAHULUAN

#### Latarbelakang Masalah

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan bagian dari upaya integral bangsa dalam upaya peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Secara makro, program penempatan TKI ke luar negeri bertujuan untuk mengurangi pengangguran sekaligus menambah perolehan devisa bagi negara (dari hasil *remittance*), yaitu pengiriman uang penghasilan TKI dari luar negeri ke Indonesia, yang biasanya dikirim melalui bank.

Untuk meningkatkan minat calon TKI bekerja di luar negeri, Depnakertrans telah bekerjasama dengan pihak perbankan, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri, untuk memberikan pembiayaan bagi TKI. TKI pada umumnya menggunakan jasa perbankan hanya sebagai sarana pengiriman uang penghasilan mereka. Hal ini juga terjadi di wilayah eks Karesidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara) TKI baru memanfaatkan

perbankan adalah untuk pengiriman uang. Peningkatan jumlah TKI maupun *remittance* mereka menunjukkan potensi TKI yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus penerimaan devisa bagi negara. Penempatan TKI merupakan pasar yang sangat potensial yang perlu digarap oleh perbankan. Karena itu perlu diadakan penelitian mengenai pola pembiayaan jasa pemberangkatan TKI.

Dampak dari pembiayaan ini sangat jelas, TKI akan sangat terbantu karena kendala tidak tersedianya dana dapat ditanggulangi. TKI dapat membayar pembiayaan ini melalui remittance gaji yang ditransfer ke Indonesia. Para PJTKI pun merasa terbantu karena semakin banyak TKI yang diberangkatkan juga akan meningkatkan volume bisnis PJTKI. *Multiplier effect* ini untuk perekonomian daerah asal TKI pun dapat dibayangkan. Devisa yang masuk ke daerah asal TKI dapat menjadi sarana penggerak ekonomi yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kelayakan pola pembiayaan TKI di Wilayah eks Karesidenan Banyumas dan menyediakan informasi dan pengetahuan bagi instansi dan masyarakat luas yang berminat untuk pemberangkatan TKI.

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner. Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah eks Karesidenan Banyumas, yang meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Sasaran unit penelitiannya adalah PJTKI, Bank, dan TKI.

**Pengumpulan dan analisis data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari PJTKI, calon TKI atau keluarga TKI, Disnakertrans, dan Bank yang akan mengirim TKI. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, berbagai media, internet, dan literatur. Untuk sampai pada tujuan penelitian yang diinginkan, beberapa metode pengumpulan data yang diperlukan antara lain *focus group discussion*, *indepth interview* dan kuisioner dilakukan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai masalah pembiayaan TKI.

**Analisis Data**

Analisis data, analisis kelayakan usaha pengerahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilakukan secara deskriptif kualitatif (*SWOT analysis*) untuk mengetahui aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek ekonomi dan sosial. Analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui kelayakan pembiayaan TKI (*feasibility*) dilihat dari aspek keuangan. Adapun alat analisis yang digunakan adalah *break even period*, *internal rate of return*, *net present value*, dan *profitability index*.

**Analisis kredit bank**, dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penilaian permohonan kredit oleh bank terhadap pembiayaan TKI. Alat analisis kredit yang digunakan bank untuk menilai kelayakan kredit TKI menggunakan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*).

#### **Sampel penelitian**

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan yang dijadikan sampel adalah; Calon TKI telah menerima kredit baik TKI yang bekerja disektor formal maupun informal. Jumlah sampel ditetapkan 2 (dua) TKI setiap kabupaten, sehingga jumlah sampel sebanyak 8 (delapan) orang TKI. PJTKI yang sudah bekerjasama dengan bank dalam pembiayaan atau pemberian kredit pada TKI. Jumlah sampel ditetapkan 2 (dua) PJTKI setiap kabupaten, sehingga jumlah sampel sebanyak 8 (delapan) PJTKI. Bank yang sudah memberikan pembiayaan pada TKI. Jumlah sampel ditetapkan 2 (dua) bank setiap kabupaten, sehingga jumlah sampel sebanyak 8 (delapan) bank.

### **PROFIL TKI DAN POLA PEMBIAYAAN**

#### **Profil TKI**

Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kontribusi para TKI untuk devisa negara Indonesia cukup fantastis. Data Direktorat Jenderal PPTKLN, Disnakertrans menunjukkan, uang yang mereka kirim ke tanah air (*remittance*) pada 2005 mencapai US\$2,7 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk valuta asing (valas) dan tabungan yang dibawa langsung TKI.

Sampai dengan akhir 2006, di wilayah eks Karesidenan Banyumas, TKI yang telah diberangkatkan mencapai 16.259, atau sekitar 2,66% dari jumlah TKI nasional yang diberangkatkan pada tahun 2006 sebanyak 611.836 TKI. Pengiriman TKI terbesar ke Malaysia (45%). Disusul ke Arab Saudi (30%), Taiwan (8%), Kuwait (5%), serta Hong Kong, Korea dan Singapura masing-masing 3%.

Jumlah TKI maupun *remittance* di wilayah eks Karesidenan Banyumas dari tahun 2004 – 2006, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tingginya animo masyarakat untuk menjadi TKI. Penyebabnya adalah karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah asal. TKI tidak memiliki keahlian yang spesifik sehingga sulit memperoleh pekerjaan di samping itu jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada di daerah asal tidak seimbang, jauh lebih banyak pencari kerja. Alasan lainnya adalah karena standar gaji di luar negeri yang relatif lebih besar. Dengan jenis pekerjaan yang sama gaji di luar negeri jauh lebih besar dibanding jika hanya bekerja di daerah asal. Jumlah TKI di wilayah eks Karesidenan banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan jenis kelamin TKI didominasi oleh tenaga kerja wanita, khususnya untuk TKI sektor informal. Rata-rata penghasilan TKI informal adalah sebesar Rp1.500.000,00 dan TKI formal sebesar Rp3.000.000,00. Standar gaji di negara Singapura, Korea maupun Hongkong lebih tinggi dibanding di negara Malaysia dan Arab Saudi. Sebagian besar TKI memilih Malaysia sebagai negara tujuan karena dipandang Malaysia tidak jauh letaknya dari Indonesia, adat istiadat dan bahasa juga tidak terlalu berbeda sehingga mereka lebih mudah beradaptasi. Sehingga meskipun standar gaji di Malaysia lebih kecil, tetapi Malaysia masih diminati sebagai negara tujuan TKI.

Motivasi utama masyarakat di wilayah eks Karesidenan Banyumas menjadi TKI adalah faktor ekonomi. Tenaga kerja yang menjadi TKI formal pada umumnya berusia muda lulusan SLTP atau SLTA yang baru menyelesaikan studinya. Mereka belum memiliki pekerjaan atau mempunyai penghasilan yang belum memadai. Karena standar gaji di negara tujuan TKI lebih tinggi dibandingkan dengan standar gaji di daerah asal, mereka berharap memperoleh penghasilan yang cukup besar.

#### **Profil Pola Pembiayaan**

Salah satu kendala yang dihadapi calon TKI adalah masalah biaya. Biaya pemberangkatan TKI relatif tinggi. Tingginya biaya tersebut menyebabkan banyak calon TKI urung berangkat. Biaya pemberangkatan TKI berbeda-beda untuk setiap negara tujuan maupun antar perusahaan jasa pemberangkatan TKI (PJTKI). Pola pembiayaan calon TKI yang telah ada di wilayah eks Karesidenan Banyumas adalah: Pembiayaan yang Bersumber dari Modal Sendiri TKI, Pembiayaan yang Bersumber dari PJTKI, Pembiayaan yang Bersumber dari Perbankan

Pola pembiayaan TKI yang bersumber dari perbankan dapat dilakukan dengan dua pola yaitu:

- a. Secara individu CTKI dapat mengajukan pinjaman pembiayaan atas namanya untuk membiayai pemberangkatannya kepada perbankan.
- b. pembiayaan kepada CTKI dilakukan melalui PJTKI yang telah bekerjasama dengan bank. PJTKI tersebut bertindak sebagai penjamin (*avalist*) berupa *company guarantee*.

#### **ASPEK PASAR DAN PEMASARAN**

##### ***Segmentation***

Pasar TKI yang tersedia di luar negeri sangat beragam, baik untuk kebutuhan industri, penata laksana rumah tangga (PLRT), maupun tenaga ahli. PJTKI sebagai penyalur atau penyedia TKI melakukan strategi segmen pasar TKI. Pasar tenaga kerja ke luar negeri cakupannya sangat luas, sehingga PJTKI akan semakin kuat kedudukannya dalam persaingan pasar apabila mempunyai segmen pasar yang jelas. PJTKI di eks karesidenan Banyumas memiliki dua segmen pasar, yaitu pasar TKI formal dan informal. Pasar tenaga kerja meliputi negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasific, Timur Tengah, Amerika dan Eropa.

### **Positioning**

*Positioning* dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang, menawarkan tenaga kerja yang berkualitas, dan menjaga citra PJTKI sebagai perusahaan jasa penyalur tenaga kerja. PJTKI hanya memasuki dua segmen pasar tenaga kerja yaitu pasar TKI formal dan informal agar dapat bersaing dengan penyedia jasa dari negara lain. Dalam hal ini PJTKI sangat berperan penting, tidak hanya dalam menyediakan TKI tetapi juga meyakinkan konsumen (negara tujuan) bahwa TKI yang ditempatkan mampu bekerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. PJTKI juga perlu menjaga citra perusahaan untuk menjaga keberlangsungannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menawarkan CTKI yang *skill*-nya tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat dan baik, dan adanya koordinasi yang baik antara PJTKI dan TKI, PJTKI dan agen yang ada di luar negeri, PJTKI dan *user*. Hal ini dapat dilihat pada meningkatnya jumlah penempatan TKI.

### **Targetting**

Setelah menetapkan segmen pasar, PJTKI menyusun strategi target untuk memenuhi permintaan pasar TKI formal dan informal, sesuai segmen pasar yang sudah ditetapkan. PJTKI selama ini ada yang mengirimkan TKI formal dan informal, atau salah satunya. Kedua segmen tersebut memudahkan PJTKI membuat strategi bagaimana memasarkan/menawarkan jasa TKI pada negara tujuan sesuai kebutuhan *user*. Kebutuhan TKI oleh *user* berbeda-beda, sehingga PJTKI perlu menyiasati penawaran TKI. Beberapa *user* membutuhkan TKI dengan *skill* yang tinggi untuk sektor formal. PJTKI juga dihadapkan pada kendala sumber daya manusia atau CTKI yang memiliki *skill* yang rendah terutama pada sektor informal. Untuk memenuhi permintaan TKI yang berkualitas, maka tidak semua CTKI yang mendaftar langsung diberangkatkan ke luar negeri, tetapi perlu adanya pelatihan bagi CTKI sesuai kebutuhan *user*.

### **Aspek Pemasaran**

#### **Produk**

Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah TKI. Perlu adanya perencanaan dan pengembangan TKI. Pengembangan CTKI berguna untuk meningkatkan kualitas TKI, dengan cara mengadakan seleksi, pelatihan bagi CTKI misalnya pelatihan teknis, bahasa, pengenalan budaya negara tujuan TKI. Untuk memperoleh produk (TKI) yang berkualitas/sesuai dengan permintaan *user* PJTKI menggunakan beberapa cara yaitu lewat organisasi maupun orang lain. Beberapa cara untuk memperoleh CTKI adalah; (1) calon TKI mendatangi PJTKI setempat, (2) PJTKI melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mengedarkan brosur, informasi dari mulut ke mulut dan sebagainya, (3) PJTKI dan CTKI tidak bertemu langsung, mereka bertransaksi melalui seorang sponsor (istilah broker dalam pemasaran TKI). Tugas sponsor yaitu mencari CTKI kemudian mendaftarkannya ke PJTKI dengan imbalan komisi.

### Harga

Penetapan harga (biaya penempatan TKI) memainkan peranan penting dalam proses bauran pemasaran karena akan terkait langsung dengan *revenue* yang diterima PJTKI. Penetapan harga juga memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. Biaya penempatan TKI ke luar negeri sudah ditetapkan sesuai peraturan Kepmen No. 104A/2002 dan SK Dirjen P2TKLN no. 312A/2002. Peraturan tersebut dijadikan acuan bagi seluruh PJTKI di Indonesia dalam menetapkan komponen pembiayaan pemberangkatan TKI ke luar negeri. Namun besarnya biaya penempatan TKI sangat beragam antar PJTKI. Keberagaman biaya penempatan menunjukkan bahwa biaya penempatan ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan PJTKI. Biaya penempatan TKI berkisar antara Rp.5.000.000,00 – Rp.15.000.000,00 tergantung atas jenis/ sektor penempatan maupun negara yang menjadi tujuan TKI.

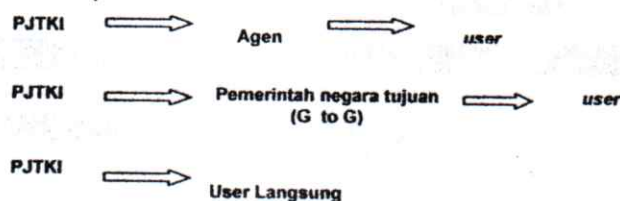
### Promosi

Promosi dilakukan disamping sebagai alat komunikasi antara PJTKI dengan *user* juga sebagai alat untuk mempengaruhi *user*. PJTKI melakukan promosi melalui *personal selling*. *Personal selling* yang dilakukan PJTKI dengan cara mendatangi *user* untuk melakukan penawaran TKI, terutama untuk TKI formal. *User* bisa saja ikut melaksanakan perekrutan CTKI apabila tenaga yang dibutuhkan memerlukan spesifikasi tertentu. Cara promosi ini memungkinkan interaksi secara personal antara PJTKI dengan *user*.

### Distribusi (Place)

Distribusi dalam *service* merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis.

Gambar. Pola Saluran Distribusi TKI



### People

*People* dalam PJTKI mempunyai peran sebagai *internal marketing* dimana interaksi antara setiap karyawan PJTKI memberikan gambaran yang kompak tapi baru sebatas penanganan terhadap pelayanan administrasi sedangkan yang memasarkan produk (Jasa TKI) dilakukan

oleh manajer yang sekaligus sebagai pemilik perusahaan. PJTKI sudah melakukan seleksi, pelatihan, dan memberikan motivasi terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM karyawan.

Perusahaan bekerjasama dengan sponsor atau *rekruter* dalam mencari CTKI, namun sponsor atau *rekruter* kurang dibekali dengan keahlian yang memadai sehingga sering memberikan kesan buruk bagi CTKI. Status sponsor pada PJTKI ada yang berstatus karyawan tetap dan mayoritas berstatus sebagai karyawan lepas. Efek dari status kepegawaian tersebut, sponsor atau perekrut kurang memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Akibat dari hal tersebut, fungsi sebagai *internal marketing* kurang baik.

#### **Physical Evidence**

*Essential evidence* PJTKI di eks Karesidenan Banyumas sangat beragam. PJTKI ada yang memiliki kantor yang representatif ada juga yang menggunakan sebagian rumah menjadi kantor PJTKI. Berdasarkan hasil pengamatan, pemilik PJTKI cenderung mengabaikan *essential evidence* tetapi lebih mementingkan pelayanan dan harga. Sedangkan *peripheral evidence* rata-rata mempunyai fasilitas yang sama.

#### **Process**

Bauran pemasaran jasa berikutnya adalah *process*. *Process* merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. *Prosess* dapat dibedakan dalam dua cara yaitu; (1) *complexity* (berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap dalam proses) (2) *divergence* (berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah atau tahap proses). Umumnya mekanisme proses penerimaan sampai pemberangkatan PJTKI telah diatur jelas oleh disnakertrans, sehingga semua PJTKI melakukan proses yang sama.

### **ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Profil PJTKI DI Wilayah eks Karesidenan Banyumas**

Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) adalah sebuah perusahaan bidang jasa yang bergerak dalam pengerahan tenaga kerja ke luar negeri. Perusahaan Jasa TKI didirikan berdasarkan SK DEPNAKERTRANS propinsi Jawa Tengah dengan bentuk PT (perusahaan terbatas).

PJTKI di wilayah eks Karesidenan Banyumas merupakan kantor cabang yang berpusat di Jakarta, dengan rata-rata jumlah karyawan bervariasi antara 4 – 20 orang. Besar kecilnya jumlah karyawan di PJTKI dipengaruhi oleh jumlah omset perusahaan. Semakin banyak TKI yang diperoleh maka semakin besar jumlah karyawan yang dibutuhkan. Biasanya

pemilik perusahaan telah menghitung tingkat efisiensi serta beban kerja bagi karyawannya sehingga jumlah karyawan yang ada sangat ideal sesuai dengan omset perusahaan.

### **Penerapan Fungsi Manajemen**

Dengan jumlah karyawan yang relatif sedikit, manajemen PJTKI relatif praktis, sederhana, fleksibel, dan mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dengan cepat, sehingga permasalahan yang terjadi di perusahaan dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan tak jarang langsung dikoordinasikan oleh pimpinan perusahaan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Hal tersebut dapat menguntungkan bagi pihak luar (*stakeholder*) dalam menjalin kerjasama karena akan lebih mudah dan cepat.

### **Aspek Sumberdaya Manusia**

Hal-hal yang berkaitan dengan aspek sumberdaya manusia PJTKI adalah sebagai berikut: (1) jumlah karyawan sangat tergantung besar kecilnya PJTKI. Pegawai tetap rata-rata berkisar antara 4 – 20 orang; (2) pendidikan karyawan mayoritas adalah SMA/D3 (85% - 90%) sisanya sarjana S1 (10% - 15%).

Konflik yang terjadi diantara karyawan pada umumnya ditentukan dengan dialog baik melibatkan pimpinan maupun tidak. Penyelesaian konflik dengan cara kekeluargaan umumnya merupakan jalan yang sering ditempuh mengingat falsafah yang dimiliki oleh perusahaan menganggap karyawan adalah saudara termasuk dalam pembagian keuntungan meskipun hanya sedikit tetapi yang penting merata. Berdasarkan survey ke lapangan, konflik yang terjadi di organisasi PJTKI frekuensinya jarang terjadi sedangkan karakteristik karyawan umumnya sangat loyal kepada perusahaan.

### **Pola Kerjasama PJTKI-Bank-Perusahaan Asuransi**

#### **Kerjasama Bank dengan PJTKI**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pemberangkatan CTKI, Bank menawarkan pinjaman kepada CTKI dengan PJTKI sebagai avalisnya. Sedangkan bentuk kerjasamanya sebagai berikut:

1. Pembiayaan TKI dilakukan bekerjasama dengan PJTKI;
2. MoU ditandatangani oleh Kantor Pusat PJTKI atau dengan Kantor Cabang atas Surat Kuasa dari Kantor Pusat;
3. Rekrutmen, pemenuhan persyaratan, dan penempatan TKI menjadi kewajiban/tanggungjawab PJTKI;
4. PJTKI menjamin kelancaran angsuran;
5. MoU berisi hak dan kewajiban masing masing pihak secara seimbang dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil survey, di wilayah eks Karesidenan Banyumas perbankan yang memberikan pinjaman kepada CTKI adalah PD BPR-BKK Cilacap Tengah. Kredit khusus TKI yang disalurkan telah mencapai 1,3 milyar dari 5 milyar yang disiapkan dari bulan Oktober 2006. Berdasarkan data, NPL (kredit bermasalah) sampai dengan April 2007 sebesar 0%. Perusahaan PJTKI yang didanai sebanyak 14 PJTKI untuk pemberangkatan TKI sebanyak 313 orang ke Taiwan, Malaysia dan Hongkong baik formal maupun informal.

#### **Kerjasama PJTKI dengan Perusahaan Asuransi**

Kerjasama antara PJTKI dengan Perusahaan asuransi telah lama terjalin. Ada beberapa perusahaan asuransi diantaranya adalah Bumi Putra, Gracia Media Utama, dan lain sebagainya. Kerjasama strategis ini sangat penting dan saling menguntungkan bagi pihak PJTKI, Bank dan perusahaan Asuransi.

Oleh karena itu PJTKI dalam mekanisme penempatan CTKI, selalu menyertakan pendaftaran CTKI pada perusahaan asuransi dengan proteksi pada kecelakaan diri selama proses pengiriman TKI ke negara tujuan. Sedangkan jenis proteksi yang dijamin oleh Asuransi meliputi: (1) meninggal dunia (2) Cacat tetap/sementara, yang berakibat tidak bisa kerja kembali, (3) melarikan diri, (4) PHK oleh perusahaan

Kerjasama antara PJTKI, bank dan perusahaan asuransi perlu dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan persepsi tentang klaim yang ditanggung merupakan kejadian yang perlu diantisipasi. Untuk itu perlu adanya kejelasan tentang klaim pertanggung jawaban terhadap risiko yang dialami oleh bank dalam pembiayaan TKI seperti meninggal dunia, cacat, melarikan diri dan PHK. Sangat memungkinkan sekali bagi pihak bank untuk memilih asuransi yang terbaik karena masih terbuka kesempatan penawaran yang meng-cover risiko TKI.

### **ASPEK KEUANGAN DAN PERKREDITAN**

#### **Aspek Keuangan**

Analisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis jasa adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti halnya ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus (Umar, 2003)

#### **Kebutuhan Dana dan Sumbernya**

Dari hasil survey yang dilakukan untuk memberangkatkan TKI yang bekerja disektor formal ke luar negeri membutuhkan dana sekitar Rp5.000.000,00 per orang. Sedangkan dana yang dibutuhkan TKI yang bekerja disektor informal lebih besar dibandingkan yang bekerja disektor formal, yaitu sebesar Rp9.425.000,00. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan TKI

diperoleh dari modal PJTKI dan pinjaman dari bank. Perbankan yang sudah melakukan pembiayaan TKI adalah PD BPR-BKK Cilacap Tengah, sedangkan bank-bank umum yang dijadikan lalu lintas transfer TKI belum bersedia membiayai walupun ditingkat pusat sudah ada MoU dalam pembiayaan TKI tersebut.

### Proyeksi Pendapatan TKI

Jika diasumsikan biaya hidup TKI di luar negeri perbulan Rp1.000.000,00 maka pendapatan bersih TKI perbulan sebesar Rp2.000.000,00 atau jika dihitung selama satu tahun sebesar Rp24.000.000,00. Sedangkan gaji pokok TKI informal rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 atau jika dihitung selama satu tahun sebesar Rp18.000.000,00.

### Kelayakan Pembiayaan TKI

Penilaian investasi untuk pembiayaan TKI dilakukan melalui beberapa alat analisis keuangan yaitu *Internal Rate of Return (IRR)*, *Payback Period (PP)*, *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)*, berikut analisis kelayakan pembiayaan TKI sektor formal dan informal.

Tabel kelayakan pembiayaan TKI

Analisis Investasi	Sektor Formal	Keterangan	Sektor Informal	Keterangan
Payback Period	2,5 bulan	< jangka waktu kredit 8 bulan (layak)	6,28 bulan	< jangka waktu kredit 8 bulan (layak)
IRR	21%	> 18% (layak)	20%	> 18% (layak)
NPV	32.560.000	Positif (layak)	18.745.000	Positif (layak)
PI	4,8	Positif (layak)	1,9	Positif (layak)

### Aspek Perkreditan

#### Kredit TKI

Pinjaman kepada calon TKI untuk membiayai penempatan ke luar negeri, melalui PJTKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) yang telah bekerjasama dengan bank. Kriteria PJTKI bekerja sama dengan bank jika memiliki persyaratan sebagai berikut; (1) rekomendasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), (2) nasabah/debitur bank, (3) berpengalaman di bidang TKI minimal dua tahun, (4) PJTKI bertindak sebagai penjamin/avalis berupa *company guarantee*, (5) menyerahkan jaminan berupa *escrow account* 10% – 20% dari kredit yang disalurkan. Sedangkan persyaratan TKI yang dapat dibiayai adalah:

1. TKI bekerja disektor formal (manufaktur/pabrik, kontruksi, perkebunan kelapa sawit dll) dan TKI yang bekerja di sektor informal yaitu penata laksana rumah tangga (PLRT) dengan negara tujuan yang telah direkomendasi BNP2TKI.

2. TKI bekerja melalui PJTKI yang telah ditunjuk dan bekerjasama dengan bank.
3. Memenuhi persyaratan legal dan perbankan misalnya; *job order*, KTP dan KK, *calling visa*, paspor, dan surat ijin orang tua/ wali/suami/istri.

Berdasarkan hasil survey di Wilayah eks Karesidenan Banyumas baru PD BPR-BKK Cilacap Tengah yang memberikan pembiayaan/kredit kepada TKI. Hal ini dilakukan oleh PD BPR-BKK Cilacap setelah mengikuti seminar dan workshop tentang pembiayaan TKI. Jenis kredit yang diberikan kepada TKI adalah "Kredit Khusus TKI" jangka waktu kredit yang diberikan kepada TKI adalah 21 bulan, bunga 1,5% perbulan, periode angsuran 18 bulan dengan plafon maksimal Rp30.000.000,00 dan *grace periode* tiga bulan, disamping memberikan kredit PD BPR-BKK Cilacap Tengah menyediakan fasilitas transfer bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri, dan setelah transfer penempatan dana TKI dipindah ke simpanan TAMADES dan deposito di PD BPR-BKK Cilacap Tengah.

Pola pembiayaan kepada TKI bisa dilakukan oleh individu (khusus TKI dengan negara tujuan Korea) maupun bekerjasama dengan PJTKI dimana PJTKI sebagai penjamin atau *avalis*. Mekanisme kerjasama BPR-BKK dengan PJTKI dilakukan dengan cara; (1) adanya MoU BPR-BKK dengan PJTKI, (2) PJTKI memberikan *job order*, *calling visa*, paspor, dan syarat lain yang dibutuhkan Bank, (3) PJTKI memberikan jaminan yang likuid.

Jumlah TKI yang sudah diberi kredit oleh BPR-BKK Cilacap sampai bulan April 2007 sebanyak 313 TKI dengan total kredit sebesar Rp1.300.414.450,00 dengan kolektivitas prosentase NPL 0%. Sedangkan sumber dana BPR BKK yang dipergunakan untuk membiayai TKI berasal dari dana masyarakat berupa tabungan TAMADES dan deposito.

Mekanisme pemberian kredit BPR-BKK Cilacap kepada TKI adalah; (a) PJTKI menyerahkan *job order*, (b) TKI sudah menerima visa kerja, (c) TKI sudah dinyatakan sehat dengan *medical check up*, (d) TKI sudah memiliki paspor, (e) Adanya kecukupan agunan PJTKI, (6) Pencairan kredit.

PD BPR-BKK Cilacap disamping memberikan fasilitas kredit TKI juga memberikan pelayanan pengiriman uang dengan bekerja sama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah pengiriman uang dengan kemudahan dan keamanan sejak proses transfer hingga uang diterima oleh keluarga TKI, bahkan BPR-BKK memberikan pelayanan khusus yaitu mengantar uang yang ditransfer tersebut sampai ke rumah keluarga TKI.

Pemberian kredit pada TKI dilengkapi dengan layanan asuransi yaitu bekerja sama dengan asuransi Bintang. Yang menjadi tertanggung dalam asuransi ini adalah TKI, pemegang polis dan ahli waris adalah bank, penutupan risiko oleh konsorsium mencakup risiko tutupan asuransi jiwa dan risiko tutupan asuransi umum.

### Analisis Kredit

Pemberian kredit atau pembiayaan kepada TKI selalu berpegang pada prinsip-prinsip perkreditan 5 C yaitu ; (1) *character*, (2) *capacity*, (3) *capital*, (4) *collateral*, (5) *condition of economic*. Penilaian terhadap prinsip 5 C oleh pihak perbankan dengan menilai PJTKI sebagai avalis dan TKI sebagai pihak yang menandatangani perjanjian kredit (PK) kepada bank.

#### 1. *Character*

Penyerahan uang kepada debitur didasari kepercayaan, kepercayaan timbul karena PJTKI sebagai debitur memiliki *character* berupa moral, watak atau sifat-sifat *personality* yang positif dan kooperatif serta memiliki rasa tanggung jawab. Kejujuran dan integritas PJTKI dan TKI untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ditunjukkan dengan; (a) *non performing loans* (NPL) 0%, (b) minimal beroperasi selama 2 tahun, (c) diperkuat dengan rekomendasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), (d) belum pernah menunggak kredit.

#### 2. *Capacity*

*Capacity* menyangkut kemampuan TKI untuk melunasi kreditnya. Penilaian ini akan dilihat dari pendapatan (gaji) TKI untuk melunasi kredit. *Capacity* ini dapat didekati dari aspek keuangan dan aspek yuridis. Aspek keuangan dilihat dari pendapatan atau gaji TKI, aspek yuridis dilihat dari kemampuan atau kapasitas TKI untuk melakukan perjanjian kredit dan melunasi kembali sesuai perjanjian. Dari *capacity* pendapatan atau gaji TKI sektor formal setelah dikurangi biaya operasional sebesar Rp2.000.000, sedangkan untuk TKI yang bekerja disektor informal sebesar Rp1.500.000, dengan besar kredit untuk TKI formal sebesar Rp5.000.000 dan sektor informal Rp9.425.000, TKI memiliki *capacity* yang cukup baik untuk melunasi kreditnya. Hal ini membuktikan kriteria kredit pada TKI masih pada kriteria lancar. Sedangkan kemampuan TKI untuk melakukan perjanjian kredit dan melunasi sesuai perjanjian cukup baik. Sedangkan *capacity* PJTKI yang bertindak sebagai penjamin/avalis berupa *company guarantee* memenuhi persyaratan legal dengan rekomendasi dari BNP2TKI. Hal ini membuktikan *capacity* PJTKI sebagai avalis memadai.

#### 3. *Capital*

*Capital* menyangkut modal yang dimiliki PJTKI sebagai avalis. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki, maka semakin tangguh menghadapi kemungkinan risiko yang dihadapi dikemudian hari. Dari hasil survei modal sendiri PJTKI lebih besar dari 30% dari total pembiayaan ( dilihat dari perhitungan *Return on equity*). Hal ini masih memenuhi persyaratan bank, sehingga dari sisi *capital* kredit TKI layak untuk diberikan (Jopie Jusuf, 2003).

#### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan PJTKI sebagai avalis atas kredit TKI yang

digunakan untuk biaya pemberangkatan TKI. Bank memerlukan jaminan untuk menutup kemungkinan risiko terburuk yaitu tidak terbayarnya hutang akibat apapun. Jaminan merupakan pengaman bagi dana perbankan yang dikucurkan. Semakin besar jaminan itu meng-cover 120% dari total kreditnya. Disamping aman, jaminan yang semakin likuid akan semakin diminati sebab dapat dijual segera bila kredit macet, untuk membiayai likuiditas bank. PJTKI menyerahkan *Collateral* likuid berupa kekayaan PJTKI yaitu sertifikat dan BPKB mobil perusahaan, PJTKI juga menyerahkan jaminan berupa *job order*, *calling visa*, paspor dan syarat lain yang dibutuhkan bank dari TKI. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan *Collateral* kredit terhadap TKI atas avalis PJTKI layak untuk dilaksanakan.

5. *Condition of economic*

*Condition of economic* adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Pada kondisi perekonomian yang relatif stabil akan mendorong pertumbuhan dunia usaha, sehingga pengucuran kredit akan aman. Sebaliknya kondisi ekonomi yang buruk akan mendorong dunia bisnis kearah kebangkrutan, untuk itu bank harus hati-hati. Berdasarkan hasil survei faktor eksternal sebagai peluang dalam PJTKI adalah; (1) Jumlah pencari kerja yang terus meningkat sementara lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri sangat terbatas dan tidak mampu meng-cover pencari kerja mengakibatkan jumlah pengangguran terus meningkat, (2) Siklus bisnis PJTKI tidak terpengaruh oleh suku bunga tinggi, (3) peraturan pemerintah sangat mendukung, (4) kondisi sosial politik yang cukup aman dan memadai. Hal tersebut diatas menunjukkan bisnis jasa pemberangkatan TKI sangat potensial untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

## **ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL**

### **Keuntungan Ekonomi Nasional**

Ditinjau dari sisi kontribusi pembangunan ekonomi nasional, sektor tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Depnakertrans menyebutkan, rata-rata arus devisa TKI tiap tahun mencapai sekitar Rp24 triliun, belum termasuk yang berbentuk valas yang dibawa langsung TKI. (Surya, 7 Mei 2007).

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Rata-rata keberangkatan TKI tiap tahun mencapai 450.000 orang. Pada 2009, target arus devisa TKI ditargetkan sebesar 20,75 miliar dolar AS (sekitar Rp186 triliun). Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliawan Hadad menyebutkan, devisa dari TKI nilainya dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Devisa yang dikirim melalui perbankan pada tahun 2006, mencapai 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp40,5 triliun). Diperkirakan, nilai sesungguhnya yang mengalir ke tanah air mencapai 6,5 miliar dolar AS, bila mencakup transfer dari non bank, misalnya dibawa langsung TKI atau lembaga non bank. (Surya, Senin, 7 Mei 2007)

Sedangkan dana yang dikirimkan oleh TKI ke Indonesia periode Januari-April 2007 mencapai 1,75 miliar dolar dan telah melampaui 51% dari periode yang sama di tahun 2006. Kiriman tahun 2006 sebesar 3,4 miliar dolar AS, meningkat 16% dari tahun 2005 senilai 2,9 miliar dolar. Sementara dari sisi pembiayaan, hingga Mei 2007 telah terealisasi pembiayaan bagi 49.711 TKI dengan nilai Rp862,3 miliar. (Suara Merdeka, 11 Juni 2007)

Selama periode Januari - April 2007 TKI yang diberangkatkan dari Jawa Tengah, 4.561 orang atau sekitar 32% dari jumlah TKI yang diberangkatkan pada tahun 2006 sebanyak 14.457 TKI. Sementara kiriman dana yang dihasilkan selama Januari sampai dengan April 2007 sebanyak Rp118 miliar, atau 13% dari kiriman tahun 2006 sebesar Rp930 miliar. *Remittance* dari TKI di Cilacap tahun 2006, sebesar Rp226.428.732.614,00 dan Banyumas sebesar Rp68.613.553.792,00 (Dinaskertrans Cilacap dan Banyumas, Mei 2007).

### **Nilai Investasi bagi TKI**

Faktor pendorong utama TKI bekerja ke luar negeri adalah langkanya kesempatan kerja di daerahnya, walaupun dengan standar upah yang diterima relatif rendah. Upah buruh di Indonesia merupakan upah yang paling rendah jika dibandingkan oleh negara-negara Asia lainnya. Dengan upah yang tergolong sangat kecil, jelas tidak akan dapat mencukupi kebutuhan keluarga dalam keseharian. Apalagi, mengingat hampir semua harga barang-barang kebutuhan pokok selalu naik setiap tahunnya. Di satu pihak, penghasilan buruh tetap, sementara harga kebutuhan meningkat. Akibatnya, tuntutan pengeluaran yang besar untuk mencukupi kebutuhan keluarga sudah tidak sebanding lagi dengan penghasilan yang diperoleh. Kondisi ini memicu orang berbondong-bondong mengadu nasib ke luar negeri dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih layak. (A Juni MP dalam SK, Selasa, 15-02-2005).

### **Hambatan di bidang ekonomi**

Hambatan di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan antara lain dikarenakan produktivitas rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas TKI yang rendah sehingga kurang menguntungkan. Kualitas TKI dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terutama bagi TKI yang pernah bekerja di luar negeri dan akan berangkat kembali.

Berdasarkan survey, diketahui tingkat pendidikan TKI yang bekerja di sektor formal dan informal masih rendah sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. TKI yang bekerja di sektor formal rata-rata berpendidikan SMA/SMK, sedangkan TKI yang bekerja di sektor informal rata-rata berpendidikan SMP.

### **Dukungan pemerintah**

Sejak Maret 2007 secara resmi Depnakertrans melalui Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan TKI Luar Negeri (PPTKLN) menyerahkan pengurusan TKI kepada Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Badan baru ini dibentuk sesuai amanat UU PPTKLN No.39/2004. Badan baru ini bertekad meningkatkan keterampilan TKI, memperbesar perlindungan dan pemberdayaan TKI, serta meningkatkan kapasitas lembaga penempatan dan perlindungan TKI.

Setelah dilatih, calon TKI harus mengikuti ujian untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi (LUK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Asosiasi Pengerahan Penempatan TKI (AP2TKI) dengan diawasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Suara Merdeka 20 Agustus 2007).

Berkaitan dengan adanya berbagai insiden yang menimpa TKI di luar negeri maka pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) no 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan demikian pemerintah akan mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan TKI secara serentak di bidang penempatan, pembiayaan, dan perlindungan. Diharapkan pula dengan adanya inpres tersebut, dapat menjadi penyuluh bagi warga Indonesia yang bermaksud menjadi tenaga kerja di luar negeri dan mampu mengatasi permasalahan yang sering terjadi selama ini.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, telah diterbitkan Buku Panduan Tenaga Kerja Indonesia edisi pertama tahun 2007, yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pembiayaan TKI. Pokja ini merupakan bagian dari tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden no 6/2006. Buku tersebut merupakan hasil kerjasama beberapa instansi pemerintah dan swasta yang menjadi anggota pokja yang berisi tentang: hal-hal yang perlu dipahami oleh Calon TKI, pelayanan perbankan yang dapat dimanfaatkan, pelayanan asuransi TKI serta informasi yang bermanfaat lainnya.

#### **Aspek Sosial**

Aspek sosial berkaitan dengan perusahaan PJTKI sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks, dan perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik (Umar, 2005). PJTKI selain bertujuan mencari keuntungan, juga mengemban misi sosial kemasyarakatan. Hal ini penting agar perusahaan dan masyarakat dapat hidup saling menguntungkan. Dengan adanya PJTKI, maka calon TKI akan terbantu dalam memperoleh informasi kesempatan kerja, gaji dan prosedur pemberangkatan.

#### **Permasalahan TKI**

TKI yang akan bekerja di luar negeri bukan tidak tahu risiko yang akan dialami, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Kasus di Kabupaten Banyumas pada Bulan Februari 2007 adalah penyiksaan TKI Asal Sokaraja yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Johor Baru, Malaysia yang akhirnya dipulangkan karena diduga tak sesuai dengan prosedur.

Dalam hal persyaratan usia sebagai TKI informal, juga belum memenuhi. Batas minimal sebagai TKI informal (PLRT) di luar negeri adalah 21 tahun, sedangkan TKI tersebut baru 20 tahun. (Suara Merdeka, 21 Februari 2007).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) diketahui pada tahun 2006 terdapat 16,6% atau 53.843 orang TKI yang bermasalah dari sebanyak 325.585 TKI yang kembali ke tanah air. Munculnya permasalahan diakibatkan antara lain karena hambatan komunikasi akibat pemahaman bahasa dan akar budaya yang tidak sama, serta majikan dan TKI tidak semuanya paham akan hak dan kewajiban.

### **Perubahan kondisi sosial yang kompleks**

Krisis moneter yang melanda Indonesia sampai saat ini belum teratasi, bahkan semakin merasuk ke semua sektor kehidupan, demikian juga bagi dunia usaha. Banyaknya usaha yang gulung tikar mengakibatkan terjadi PHK. Ditambah dengan banyaknya masyarakat usia produktif yang belum tertampung di dunia kerja, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu alternatif penyelesaian masalah pengangguran adalah bekerja menjadi TKI di luar negeri.

Keberadaan pemberangkatan TKI ke luar negeri dapat mengatasi pengangguran di tanah air walaupun belum signifikan. Hal ini mengingat masih banyaknya calon TKI yang belum tertampung di lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada awal 2007 menunjukkan angka 8,10% (1.436.888 orang) dan angkatan kerja keseluruhan (17.737.595 orang). Jika dibanding jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2006, menunjukkan penurunan sebesar 0,10%, di mana pada awal tahun 2006 tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 8,20%. (Disnakertrans Jateng).

### **Perubahan masyarakat yang pluralistik**

Perubahan masyarakat yang pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, atau politik. Bisnis/usaha hendaknya memberikan dampak positif di masyarakat, seperti; membuka lapangan kerja, melaksanakan alih teknologi, meningkatkan mutu hidup, dan pengaruh positif lainnya (Umar, 2005).

PJTKI di wilayah eks Karesidenan Banyumas telah melakukan kerja sama dengan pihak lain yaitu BPR BKK Cilacap Tengah, Asuransi Bintang, sekolah-sekolah SMU/SMK, pemerintah daerah, Disnakertrans, serta instansi pemesan TKI dari luar negeri sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan saling mendukung.

Di samping itu, selama ini PJTKI di Eks Karesidenan Banyumas telah merekrut karyawan dari masyarakat sekitar kantor. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga

keberadaan PJTKI bermanfaat bagi warga dalam rangka memberi kesempatan kerja serta mengurangi angka pengangguran.

Adanya bisnis TKI menciptakan bisnis lain seperti: jasa penukaran uang (*money changer*), jasa pelatihan-pelatihan dan usaha-usaha lain yang didanai dari modal TKI ketika mereka kembali ke tanah air.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pembiayaan dapat dilakukan melalui pembiayaan dari modal TKI sendiri, pembiayaan yang dilakukan oleh PJTKI, pola pembiayaan oleh perbankan dengan avalis PJTKI dan pola pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan langsung kepada TKI. Keempat pola tersebut dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada syarat-syarat pembiayaan. Dan berdasarkan analisis SWOT, jasa pemberangkatan TKI layak dibiayai oleh perbankan. Keterlibatan perbankan akan menguntungkan jika menggunakan pola pembiayaan TKI dengan PJTKI sebagai avalis. Risiko dapat diminimalisir apabila perbankan tetap mengacu pada prinsip 5 C.
2. Berdasarkan analisis SWOT dari aspek pasar dan pemasaran, pembiayaan pada TKI layak untuk dilakukan karena; PJTKI sudah memiliki segmen pasar yang jelas, yaitu pasar TKI formal dan informal, walaupun segmen yang jelas tersebut belum didukung oleh TKI yang berkualitas (memiliki *skill* yang baik), kurang mampu beradaptasi dengan cepat dan baik. Peningkatan permintaan TKI oleh *user* masih berupa tenaga kerja penata laksana rumah tangga (PLRT) untuk sektor informal, sedangkan disektor formal TKI ditempatkan pada teknis operasional atau dilevel bawah pada perusahaan. Bagi PJTKI Kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya didukung adanya koordinasi dan interaksi yang baik antara PJTKI dengan *user* dan TKI, juga terbukanya peluang kerjasama *G to G* dengan negara tujuan TKI. Minat masyarakat untuk menjadi TKI masih sangat tinggi, hal ini didorong oleh tingginya penghasilan yang diterima diluar negeri.
3. Berdasarkan analisis SWOT aspek manajemen dan SDM, dapat diketahui bahwa PJTKI umumnya mempunyai reputasi yang baik dengan karyawan yang berpengalaman. Adanya PJTKI dengan istilah "nakal" dapat dihindari dengan mencermati reputasi dan prestasi PJTKI dimasa lalu. Kerjasama antara PJTKI, bank dan perusahaan asuransi perlu dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan persepsi tentang klaim yang ditanggung merupakan kejadian yang perlu diantisipasi. Untuk itu perlu adanya kejelasan tentang klaim pertanggung jawaban terhadap resiko yang dialami oleh bank dalam pembiayaan TKI seperti meninggal dunia, cacat, melarikan diri dan PHK. Sangat memungkinkan sekali bagi pihak

bank untuk memilih asuransi yang terbaik karena masih terbuka kesempatan penawaran yang meng-cover resiko TKI.

4. Berdasarkan aspek keuangan, pembiayaan TKI layak dilakukan baik TKI yang bekerja disektor formal maupun informal. Hal ini dibuktikan melalui analisis finansial dimana; (a) *Payback period* selama 2,5 bulan untuk sektor formal, dan 6,28 bulan untuk sektor informal lebih cepat dibandingkan dengan lama kontrak kerja TKI yaitu 2 tahun, (b) *Internal rate of return* (IRR) sebesar 21% untuk sektor formal dan 20% untuk sektor informal lebih besar dibandingkan tingkat bunga kredit TKI, (c) besarnya NPV 32.360.000 untuk sektor formal dan 18.745.000 untuk sektor informal semuanya positif, (d) besarnya *Profitability Index* (PI) sebesar 4,8 untuk sektor formal dan 1,9 untuk sektor informal. Sedangkan berdasarkan aspek perkreditan dengan menggunakan analisis kredit 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*) pembiayaan terhadap TKI layak untuk dilakukan.
5. Berdasarkan aspek ekonomi pembiayaan terhadap TKI akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi nasional yaitu mampu mendatangkan devisa yang cukup tinggi, bahkan merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, dengan rata-rata arus devisa TKI tiap tahun mencapai sekitar Rp24 triliun, belum termasuk yang berbentuk valas yang dibawa langsung TKI, disamping itu pemberangkatan TKI telah memberikan sumbangan kepada negara untuk mengurangi pengangguran. Sedangkan bagi TKI hasil kerja di luar negeri mampu memberikan perubahan ekonomi bagi keluarganya yang lebih baik. Dampak sosialnya TKI menjadi lebih dihargai dimasyarakat karena status ekonominya meningkat lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Retno B.H, 2004. *Penerimaan Devisa Negara dari Remittance TKI Luar Negeri*.
- Jusuf jopie, 2003. *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta
- Riyanto Bambang, 1995. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE UGM Yogyakarta
- Kotler Philip, 1996 *Manajemen Pemasaran analisis Perencanaan dan Pengendalian*. PT. Gelora Aksara Pratama Jakarta
- Lupiyadi Rambat, 2001. *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek*. Salemba Empat Jakarta
- Nazir Muhammad, 2003. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Schuler Randal S, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi abad Ke-21*. Erlangga Jakarta
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES UGM,

Yogyakarta

Stanton William J, 2005. *Prinsip Pemasaran*. Erlangga Jakarta

Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN Yogyakarta

Umar Husein, 2003. *Studi Kelayakan dalam Bisnis Jasa*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2005. *Studi Kelayakan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Http:// [www.tki.or.id](http://www.tki.or.id)

Http:// [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), 21 Februari 2007-07-27

, 1 Juni 2007-07-27

Http:// [www.disnakertransjateng.go.id](http://www.disnakertransjateng.go.id)

Http:// [www.surya.com](http://www.surya.com), 7 Mei 2007

Http:// [www.suarakarya.com](http://www.suarakarya.com), 15 Februari 2005

Http:// [www.bankniaga.com](http://www.bankniaga.com), Juli 2007

Http:// [www.kr.com](http://www.kr.com), 23 Mei 2007